



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH (BPPA)

2017-2022

JAKARTA 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan penghubung Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Kami berharap Rencana Strategis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkompeten sehingga dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Pemerintah Aceh masih memerlukan penyempurnaan sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Rencana Strategis ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhai segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, daerah dan negara.

Jakarta, 15 Maret 2019

Kepala Badan Penghubung
Pemerintah Aceh



Almuhiza Kamal, SSTP. M.Si
Pembina
NIP. 19800120 199912 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian dan Fungsi RenstraBPPA	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra BPPA.....	1
1.1.3 Keterkaitan Renstra dan RPJMA, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	2
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II	
GAMBARAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan BPPA, Struktur Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi BPPA	6
2.2 Sumber Daya Badan Penghubung Pemerintah Aceh	12
2.2.1 Sumber Daya Manusia	12
2.2.2 Asset/Modal.....	13
2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional	15
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh	15
2.3.1 Pencapaian Kinerja BPPA Berdasarkan Sasaran/Target Renstra BPPA Periode Yang Lalu SPM, MDGs atau Indikator Pelayanan lainnya.....	15
2.3.2 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPA	17
2.3.3 Interpretasi Gap/Kesenjangan Pelayanan dan Pencapaian Target Kinerja serta Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan dan Pencapaian Kinerja Tersebut	18
2.3.4 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPA.....	18
2.3.5 Interpretasi Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan BPPA.....	19

2.4	Tantangan dan PeluangBadan Penghubung Pemerintah Aceh	19
2.4.1	Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kab/Kota.....	20
2.4.2	Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS yang Berimplikasi pada Tantangan dan Peluang pada Pelayanan BPPA	20
2.4.3	Macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan dan Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan yang dibutuhkan.....	20
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	21
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	21
3.1.1	Permasalahan BPPA beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhi.....	21
3.1.2	Mempedomani Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	21
3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih.....	22
3.2.1	Tugas dan Fungsi BPPA yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Unggulan Kepala Daerah	25
3.2.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA yang Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah	26
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	27
3.3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA yang Mempengaruhi Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota..	27
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.4.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA yang mempengaruhi dari implikasi RTRW dan KLHS.....	27
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis	27
3.5.1	Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA ditinjau dai Tugas dan Fungsi Sasaran Menengah Renstra K/L dan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS	27
3.5.2	Metode Penentuan Isu-Isu Strategis	28
3.5.3	Isu-isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPPA Tahun Rencan..	29
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN.....	30
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPA.....	30

4.1.1	Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPA	30
4.1.2	Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPA	31
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	32
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan BPPA dalam Lima Tahun	32
5.2	Relevansi dan Konsistensi Antara Visi dan Misi RPJMA Periode 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPPA	32
5.3	Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33
BAB VI	INDIKATOR KINERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA	35
6.1	Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPPA	35
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
7.1	Indikator Kinerja BPPA yang mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMA	41
7.2	Tabel Indikator Kinerja BPPA yang mengacu pada Sasaran dan Tujuan RPJMA.....	41
BABA VIII	PENUTUPAN	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian dan Fungsi Renstra BPPA

Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang disingkat dengan Renstra BPPA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022.

Renstra BPPA sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahun yang mempunyai fungsi sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan di masa depan dan sebagai acuan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPA yang merupakan dokumen perencanaan pada setiap tahun anggaran dari tahun 2017 s.d 2022

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Dengan telah dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode Tahun 2017-2022 pada tanggal 5 Juli 2017, maka sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014, Kepala Daerah diwajibkan menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya setiap perangkat daerah, diantaranya BPPA wajib menyusun Renstra Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun. Dalam proses penyusunan Renstra, BPPA melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program dalam RPJMA Kepala Daerah terpilih.

1.1.3 Keterkaitan Renstra dan RPJMA, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini merupakan bagian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Sehingga penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini tidak lepas dari RPJMA, Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota, dengan demikian antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi maupun Kab/Kota mempunyai program yang saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra BPPA ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 11. Qanun Aceh nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
 12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007-2012.
 13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017.
 14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembar Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87)

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis BPPA disusun dengan maksud untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program dan kegiatan pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintah di Jakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPA lima tahun ke depan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah sebagai dokumen perencanaan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan dalam upaya pencapaian visi, misi serta sasaran

BadanPenghubung Pemerintah Aceh dalam mendukung keberhasilan visi dan misi Pemerintah Aceh dan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, dengan sistematika penulisan sebagai berikut sebagai suatu dokumen perencanaan Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Bab ini berisi gambaran umum pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pembangunan pelayanan.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penghubung Pemerintah Aceh, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaahan renstra K/L dan rensta Badan Penghubung Pemerintah aceh, telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Pemerintah Aceh

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indkatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja Badan Penghubung Pemerintah aceh secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA tahun 2017-2022

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR BPPA

2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan BPPA, Struktur Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi BPPA

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh, menyatakan bahwa Kepala Badan Penghubung pemerintah Aceh mempunyai *tugas* membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawadan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa.

Untuk melaksanakan tugas diatas, Badan Penghubung Pemerintah Aceh mempunyai *fungsi* :

- a. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja Pemerintah Aceh dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi lain;
- b. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan Perwakilan Negara Asing di Jakarta;
- c. Pelaksanaan fasilitasi hubungan kerja dengan instansi/lembaga swasta nasional dan lembaga internasional yang mewakili perwakilan di Jakarta;
- d. Pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Gubernur dan/atau Pejabat Aceh yang sedang bertugas di Jakarta dan sekitarnya;
- e. Pelaksanaan fasilitasi promosi potensi, sumber daya dan seni budaya; dan
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, maka disusun beberapa tugas dari kepala Badan, Subbag Tata Usaha dan beberapa sub bidang sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Penghubung pemerintah Aceh mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang meliputi kegiatan hubungan antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi potensi daerah, mengelola anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud diatas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah Aceh;
- e. Pelaksanaan pembinaan masyarakat Aceh perantauan yang berada di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi promosi potensi daerah;
- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota di Jakarta dan sekitarnya;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan Anjungan Aceh di Jakarta
- i. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan Aset Pemerintah Aceh di Pulau Jawa
- j. Pelaksanaan dan pengkoordinasian Pengelolaan data base, informasi potensi dan sumber daya daerah pemerintah Aceh
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perwakilan dan penghubung pemerintah Aceh, dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugasnya

2. Sub Bagian Tata Usaha

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 105 Tahun 2016 menyatakan :

- a. Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan
- b. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan, urusan administrasi, umum, kelengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan , pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud, sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Pembinaan kepegawaiaan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pengelolaan aset pemerintah Aceh di pulau Jawa;
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;

- g. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat

Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang Hubungan Antar Lembaga instansi pemerintah atau swasta dan masyarakat.

Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan hubungan antar pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lainnya, perwakilan negara asing, pihak swasta dan pembinaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas, fungsi Seksi Hubungan Antar Lembaga adalah :

- a. Pelaksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan masyarakat
- b. Pelaksanaan hubungan antar lembaga;
- c. Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbidang Pelayanan dan Informasi

Subbidang Pelayanan dan Informasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang pelayanan dan informasi.

Subbidang pelayanan dan informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah, pengelolaan database, protokoler, fasilitasi akomodasi, transportasi, konsumsi kepada unsur pimpinan, pejabat daerah dan tamu pemerintah Aceh.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dimaksud diatas Subdin Pelayanan dan informasi mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan informasi kebijakan pemerintah provinsi dan perkembangan pembangunan daerah;
- b. Pengelolaan database potensi dan sumber daya daerah provinsi;
- c. Pelayanan protokoler kepada unsur pimpinan, pejabat Aceh dan tamu pemerintah Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan dan informasi; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Subbidang Promosi dan Pameran

Subbidang promosi dan pameran adalah unsur pelaksana teknis dibidang promosi dan pameran.

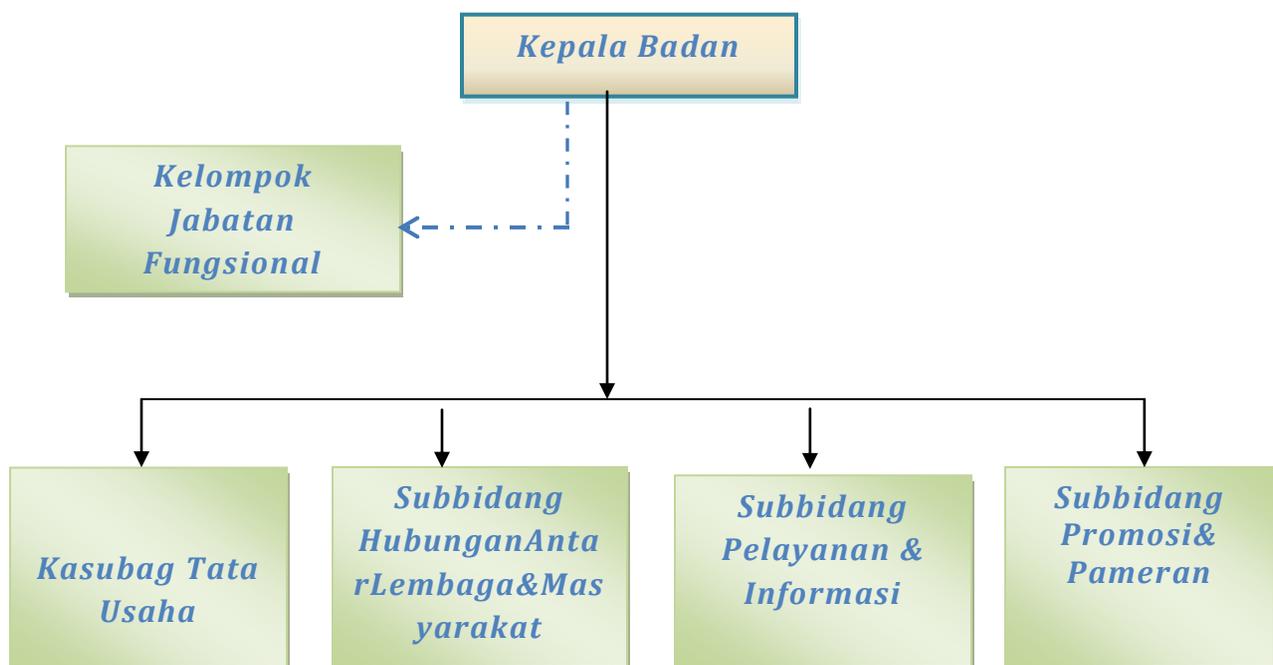
Subbidang Promosi dan Pameran mempunyai tugas melakukan pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, fasilitasi kegiatan promosi, pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya sub bidang Promosi dan Pameran mempunyai fungsi

:

- a. Pelaksanaan penyiapan data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program di bidang promosi dan pameran potensi Aceh;
- b. Pelaksanaan fasilitasi promosi dan pameran potensi Aceh di Jakarta dan sekitarnya;
- c. Pengelolaan Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang promosi dan pameran;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara Struktur, Susunan Organisasi Pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah sebagai berikut:



2.2 SUMBER DAYA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam struktur organisasi Pemerintah Aceh, Badan Penghubung berada pada jenjang eselonering III.a. Satuan kerja ini terdiri dari 4 (empat) jabatan eselon IV.a, yaitu :

- a. Kepala Badan
- b. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Subbidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat
- d. Subbidang Pelayanan dan Informasi
- e. Subbidang Promosi dan Pameran

Tabel 2.1

Komposisi Badan Penghubung Pemerintah Aceh Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan Ruang Dan Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan			Tingkat Pendidikan					
			L	P	II	III	IV	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala Badan	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
2	Bagian Tata Usaha	21	12	9	9	10	2	1	-	8	-	9	3
3	Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat	3	3	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1
4	Bidang Pelayanan dan Informasi	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
5	Bidang Promosi dan Pameran	16	5	11	6	10	1	-	1	5	2	8	1
6	Diperbantukan pada instansi lain	4	4	-	1	1	2	-	-	1	-	-	3
7	MPP	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
TOTAL		49	28	21	16	27	7	1	1	15	2	23	8

Sumber :BadanPenghubungPemerintah Aceh, 2017

Sedangkan Pegawai Kontrak terdiri dari: 26 orang

Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan jenjang karier sebanyak 11 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Diklat Pim II sebanyak 0 orang (0 %)
- b. Diklat Pim III sebanyak 3 orang (27 %)
- c. Diklat Pim IV sebanyak 8 orang (73 %)

2.2.2 Asset/Modal

Badan Penghubung Pemerintah Aceh memiliki beberapa asset tetap dan asset bergerak yaitu antara lain:

Asset Tanah dan Bangunan :

- 1 Kantor di JL indramayu No.1 Menteng Jakarta Pusat, luas lahan $\pm 491 \text{ m}^2$
- 2 Rumah Dinas Kepala Badan di Jl Cipinang Kebembem V No.2 RT0012/RW013, Pisangan Timur, Kec.Pulo Gadung, Jakarta Timur, dengan luas lahan $\pm 328 \text{ m}^2$
- 3 Mess Pemerintah Aceh di JL RP. Soeroso No.14, Cikini – Jakarta Pusat, dengan luas lahan $\pm 2148 \text{ m}^2$. Mess ini terdiri dari 8 lantai dan 2 basement untuk parkir, memiliki 65 kamar untuk penginapan dan 1 Aula besar pertemuan dengan segala fasilitas penunjang lainnya.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh juga mengelola Anjungan Aceh TMII, namun status tanah pinjam pakai, sedangkan bangunan Anjungan menjadi asset Badan Penghubung Pemerintah Aceh. Rincian asset lainnya dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2

Aset BPPA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KONDISI
1	Tanah Bangunan	2	Baik
2	Portable Water Pump	2	Baik
3	Kendaraan Roda 4	19	Baik
4	Sepeda Motor	3	Baik
5	Global Positioning System	1	Baik
6	Garu	1	Baik
7	Tombak	1	Baik
8	Alat Pemeliharaan Tanaman Lain-lain	1	Baik
9	Mesin Ketik Elektronik	3	Baik
10	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
11	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	3	Baik
12	Lemari Besi	3	Baik
13	Rak Kayu	1	Baik
14	Filling Kayu	8	Baik
15	Lemari Kaca	3	Baik
16	Lemari kayu	4	Baik
17	Mesin Absensi	1	Baik
18	Alat Pemotong Kertas	1	Baik
19	Rak Kayu	3	Baik
20	Meja Besi/Metal	4	Baik
21	Meja Kayu/Rotan	4	Baik
22	Kursi Besi/Metal	8	Baik
23	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	11	Baik
24	Meja Rapat	7	Baik
25	Meja Makan	4	Baik
26	Meja Resepsion	3	Baik
27	Meja Tambahan	8	Baik
28	Meja Bundar	5	Baik
29	Kursi Rapat	17	Baik
30	Kursi Tamu	6	Baik
31	Kursi Tangan	1	Baik
32	Kursi Putar	20	Baik
33	Kursi Biasa	9	Baik
34	Kursi Lipat	50	Baik
35	Meja Komputer	2	Baik
36	Bantal	6	Baik
37	Seprei	52	Baik
38	Meja Biro	18	Baik
39	Sofa	2	Baik
40	Kaca Bening	2	Baik
41	Lemari Pakaian	7	Baik
42	Moubiler bingkai kayu	30	Baik
43	Diner set peralatan makan	4	Baik
44	Tempat Air	1	Baik
45	Gorden Set	6	Baik
46	Bak Sampah	2	Baik
47	Wardrobe	7	Baik
48	Lemari Kulkas	2	Baik
49	Lemari File	1	Baik
50	Bed Head	8	Baik
51	Bed Hotel (Matras +	4	Baik
52	Bed Asesoris	13	Baik
53	Long Chair	1	Baik
54	Side Table	1	Baik
55	Bed Side Lamp	2	Baik
56	Vacum Cleaner	3	Baik
57	Mesin Cuci	1	Baik
58	Kulkas	7	Baik
59	AC Split	55	Baik
60	Tabung Gas	2	Baik
61	Mesin Pompa Air	1	Baik
62	Alat Dapur Lain-lain	12	Baik
63	Televisi	12	Baik
64	Wireless	1	Baik
65	Microphone	3	Baik
66	Kamera	2	Baik
67	Alat Hiasan	31	Baik
68	Tiang Bendera	6	Baik
69	Petaka	4	Baik
70	Water Filter	1	Baik
71	Kaca Hias	9	Baik
72	Dispenser	8	Baik
73	Coofee Maker	1	Baik
74	Handy Cam	1	Baik
75	PC	14	Baik
76	Lap Top	3	Baik
77	Note Book	2	Baik
78	Hard Disk	1	Baik
79	Printer	17	Baik
80	Scaner	3	Baik
81	Peralatan studio Visual Lain-	7	Baik
82	Camera Electronic	1	Baik
83	Video Monitor	22	Baik
84	Loadspeaker	1	Baik
85	Mega Phone	2	Baik
86	Sound System	2	Baik
87	Telephone	3	Baik
88	Handy Talki	2	Baik
89	Faximile	6	Baik
90	Barang Kerajinan Lain-lain	850	Baik

Sumber buku Inventaris Barang 2017

Ket : Aset belum termasuk Aset Mess Aceh yang baru diserahterimakan akhir tahun 2017.

2.2.3 Unit Usaha Yang Masih Operasional

Badan Penghubung Pemerintah Aceh memiliki unit usaha berupa kantin untuk pengunjung dan pegawai di Anjungan Aceh TMII, namun sejak tahun 2017 usaha kantin tersebut dihentikan, karena beberapa bangunan di anjungan Aceh TMII sedang dilakukan renovasi. Setelah pekerjaan renovasi selesai dilakukan, maka usaha kantin akan kembali berfungsi. Perencanaan kedepan Badan Penghubung juga akan mengelola Mess Pemerintah Aceh di Jakarta yang sebelumnya dikelola oleh pihak ketiga/swasta dibawah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh setelah diserahkan kembali tahun 2017 kepada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

2.3 KINERJA PELAYANAN BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

2.3.1 Pencapaian Kinerja BPPA Berdasarkan Sasaran/Target Renstra BPPA Periode Yang Lalu, SPM, MDGs dan Indikator Pelayanan Lainnya

Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam mewujudkan Sasaran Renstra dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, periode tahun 2012-2017 telah melaksanakan 3(tiga) program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah, Program Pagelaran Seni Budaya Daerah serta Program Pengembangan Data dan Informasi.

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah bertujuan memfasilitasi pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya seperti pemberian bantuan tiket bus untuk masyarakat Aceh yang telantar di Jakarta untuk kembali ke daerah asal, memfasilitasi sewa kamar hotel untuk tamu pemerintah Aceh dan sewa sarana transportasi udara, ikut berpartisipasi dalam kegiatan Forum Komunikasi Penghubung Pemerintah Seluruh Indonesia (Forkappsi), Forum Komunikasi Anjungan Daerah (Fokad), Darma Wanita dan Forum Komunikasi Perempuan Peduli Aceh (FKPPA), memfasilitasi Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya serta Pertemuan Pemda Aceh dengan FORBES (Anggota DPR RI Asal Aceh).

Dalam hal pemberian fasilitasi kamar hotel dan tiket transportasi udara setiap tahun bergantung pada frekuensi kegiatan Pejabat Daerah atau tamu yang dilayani sehingga persentase yang didapat dalam periode 2013 sampai 2016 sangat fluktuatif.

Pada tahun 2012 jumlah pemberian bantuan kegiatan masyarakat Aceh diperantauan mencapai 60% dari 10 kegiatan yang ditargetkan. Namun sejak tahun 2013 bantuan tersebut tidak dianggarkan lagi pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh.

Kegiatan Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se-Jabodetabek di Jakarta dilakukan 1 kali dan telah menjadi agenda tahunan, bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar Pejabat Daerah dengan Masyarakat Aceh yang berada di Jakarta dan sekitarnya, serta sosialisasi program pembangunan yang sedang dilakukan di Aceh. Begitu juga Pertemuan Pemda Aceh dengan Forbes (anggota DPR RI asal Aceh) yang menjadi agenda pertemuan tahunan yang bertujuan untuk membicarakan perkembangan dan rencana pembangunan yang sedang dilakukan di Aceh. Lebih jelas tentang kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh dapat digambarkan dengan indikator-indikator dalam *tabel 2.4*

2.3.2 Tabel Pencapaian Target Kinerja Pelayanan BPPA

**TABEL 2.3 (T-C.23)
PENCAPAIAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah akomodasi tamu pemerintah Aceh yang difasilitasi				80 kamar	90 kamar	95 kamar	30 kamar	40 kamar	90 kamar	65 kamar	38 kamar	45 kamar	48 kamar	113%	72%	40%	150%	120%
2	Jumlah masyarakat Aceh yang difasilitasi untuk kembali ke daerah asal				65 orang	66 orang	80 orang	60 orang	45 orang	40 orang	65 orang	64 orang	61 orang	59 orang	62%	98%	80%	102%	131%
3	Jumlah tamu Pemerintah Aceh yang difasilitasi transportasi				10 orang	12 orang	50 orang	15 orang	10 orang	12 orang	11 orang	20 orang	17 orang	26 orang	120%	92%	40%	113%	260%
4	Frekuensi pelaksanaan sosialisasi program dan kebijakan Pemerintah Aceh kepada				- kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	0 kali	1 kali	1 kali	0%	0%	0%	100%	100%
5	Frekuensi Pertemuan Pemerintah Aceh dengan Forbes				- kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	0 kali	1 kali	0 kali	0%	100%	0%	100%	0%
6	Jumlah kegiatan promosi dan seni yang				18 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	9 kegiatan	12 kegiatan	18 kegiatan	18 kegiatan	17 kegiatan	8 kegiatan	8 kegiatan	100%	100%	94%	89%	67%
7	Jumlah Pengunjung yang				- orang	1000 orang	1,000 orang	1,000 orang	15,000 orang	- orang	300 orang	300 orang	1,000 orang	20,000 orang	0%	30%	30%	100%	133%
8	Jumlah database masyarakat Aceh yang tersusun berdasarkan profesi se-Jabodetabek				- orang	500 orang	500 orang	125 orang	125 orang	500 orang	370 orang	- orang	334 orang	- orang	0%	74%	0%	267%	0%
9	Jumlah pengunjung website				- orang	2000 pengunjung	2,500 pengunjung	1,000 pengunjung	1,500 pengunjung	2,000 pengunjung	2,200 pengunjung	6,005 pengunjung	1,521 pengunjung	1,500 pengunjung	0%	110%	240%	152%	100%

2.3.3 Intepretasi Gap/Kesenjangan Pelayanan dan Pencapaian Target Kinerja serta Faktor yang Mempengaruhi Kesenjangan dan Pencapaian Kinerja Tersebut

Pada pelaksanaan kegiatan promosi dan seni tidak mencapai target pada tahun 2016, hal ini disebabkan adanya gap/kesejangan antara target yang ingin dicapai dengan anggaran yang dialokasikan. Sedangkan pada pelaksanaan kegiatan pengumpulan database masyarakat terjadi kesenjangan karena masih kurangnya SDM yang memiliki keterampilan dalam pengumpulan dan pengolahan data.

2.3.4 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPPA

Tabel. 2.4 (T-C.24)

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN BPPA

No.	Uraian	Target pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.255,326.650	4.144,351.000	4.168,853.926	4.919,349.876	3.606,413.554	3.930,626.245	3.876,297.726	3.606,121.309	4.469,407.951	3.380,590.850	92	100	87	91	94		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.058,104.975	1.886,380.000	1.919,780.634	2.529,768.725	2.341,385.840	4.678,055.058	1.675,893.448	1.870,471.282	2.401,920.038	2.272,500.115	92	89	97	95	97		
2	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	100,000,000	-	107,700,000	-	3,940,000	99,500,000	-	107,215,000	-	3,940,000	100	-	100	-	100		
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45,000,000	50,000,000	49,000,000	41,000,000	31,050,000	12,800,000	46,700,000	22,200,000	39,250,000	29,500,000	28	93	45	96	95		
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	50,000,000	-	-	-	-	49,720,000	-	-	-	-	99	-	-	-		
5	Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Luar Daerah	399,082,500	721,500,000	901,025,000	509,736,000	368,361,000	388,637,572	391,473,363	399,837,486	463,061,777	308,797,789	97	54	44	91	84		
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	-	337,100,000	-	-	-	-	334,080,600	-	-	-	-	99	-	-	-		
7	Program Pagelaran Seni Budaya	1,171,500,000	1,473,060,000	1,047,840,000	675,700,000	1,398,150,000	1,446,750,000	1,410,437,700	915,960,600	668,820,000	1,366,350,000	98	96	87	99	98		
8	Program Pengembangan Data dan Informasi	-	50,000,000	75,000,000	88,900,000	34,420,000	-	49,610,000	74,580,000	88,620,000	34,420,000	-	99	99	100	100		

2.3.5 Intepretasi Rasio Antara Realisasi dan Anggaran serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan BPPA

Kinerja keuangan Badan Penghubung Pemerintah Aceh 2012-2017 dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana program utama yaitu Program Peningkatan Pelayanan masyarakat di Luar Daerah, memiliki rasio yang kurang baik pada tahun 2014 dan 2015 karena adanya pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se-Jabodetabek di Jakarta dan kegiatan Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes tidak terlaksana, disebabkan kurangnya koordinasi untuk bisa menghadirkan Unsur Pemda Aceh yang berkepentingan untuk bisa hadir di kegiatan tersebut. Sedangkan pada tahun 2013,2016 dan 2017 Program tersebut dapat terlaksana sehingga memiliki rasio yang baik. Data rasio realisasi tersebut dapat dilihat pada *tabel 2.5*.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dari analisis faktor eksternal ditemukan berbagai peluang yang perlu dimanfaatkan dalam strategi dan kebijakan BPPA, antara lain:

- a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi;
- b. Tersedianya inovasi teknologi yang memadai;
- c. Berlokasi di Jakarta, maka lebih memudahkan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan lembaga di Pusat/Jakarta;
- d. Tingkat kunjungan wisatawan yang tinggi di Anjungan Aceh TMII.

Sedangkan Tantangan yang dihadapi yaitu :

- a. Tuntutan standar pelayanan yang berkualitas;
- b. Kapasitas SDM yang berkualitas dalam pelayanan;
- c. Tuntutan pengelolaan informasi yang memadai.

2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota

Badan Penghubung Pemerintah Aceh tidak melakukan telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota, dikarenakan BPPA merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghubung dalam pelayanan Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan tugas tersebut, sehingga tidak memiliki dampak terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota.

2.4.2 Telaahan Terhadap RTRW dan KHLS yang Berimplikasi pada Tantangan dan Peluang pada Pelayanan BPPA

Badan Penghubung Pemerintah Aceh selaku Badan yang bertugas menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan daerah provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 merupakan Perangkat Daerah Non Teknis. Karena tidak melakukan pembangunan fisik dilapangan, sehingga kebijakan yang diambil tidak berimplikasi dengan RTRW/KLHS dan pelanggaran terhadap RTRW/ KLHS tidak terjadi.

2.4.3 Macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan dan Arah Lokasi Pengembangan Pelayanan yang dibutuhkan

Dari segi pelayanan, kapasitas BPPA sebagai Badan yang memiliki *tugas* membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawadan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa, perlu lebih ditingkatkan kualitas pelayanannya. Tujuan dari hal tersebut agar urusan kelembagaan antara pusat dan daerah lebih lancar, Masyarakat Aceh terutama yang berada di Jabodetabek lebih bisa merasakan manfaat dan merasa puas dengan pelayanan dan meningkatkan pelayanan terhadap promosi budaya Aceh di Jabodetabek.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

3.1.1 Permasalahan BPPA beserta Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Sebagai Badan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawadan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa. Terdapat beberapa permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target kinerja berkaitan dengan tugas dan fungsi tersebut

3.1.2 Tabel Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

TABEL 3.1

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public masih kurang baik	Belum optimal dukungan seluruh aparatur Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi masing-masing aparatur 2. SOP belum berjalan dengan optimal 3. Masih kurangnya pengembangan Sumber Daya ASN 4. Masih kurangnya sarana pendukung kinerja aparatur
2	Pelayanan dan pembinaan terhadap Masyarakat Aceh di Jabodetabek belum maksimal	Belum tersusunnya secara lengkap database Masyarakat Aceh di Jabodetabek sebagai dasar penyusunan kegiatan pembinaan Masyarakat Aceh di Jabodetabek	Keterbatasan SDM dan Anggaran dalam penyusunan database tersebut

2	Pelayanan fasilitasi kegiatan promosi dan pameran seni budaya Aceh di Jabodetabek belum maksimal	1. Masih kurangnya pelaksanaan kegiatan pagelaran seni dan pameran potensi Aceh di Jabodetabek 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan seni budaya masih harus ditingkatkan	Keterbatasan Anggaran
3.	Ketersediaan Informasi mengenai Aceh secara keseluruhan masih belum optimal	Belum optimal dalam pengumpulan data dan informasi	Keterbatasan SDM dalam pengumpulan data dan membangun jaringan/network dengan pihak terkait dalam hal pengumpulan dan

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam penyampaian visi dan misi Gubernur Aceh yang dimasukkan dalam RPJM Aceh 2012-2017, Gubernur Aceh menyampaikan visi pemerintah Aceh yaitu :

“ Terwujudnya Aceh Yang Damai Dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Bersih, Adil Dan Melayani ”.

Untuk mewujudkan visi itu, maka di lahirkan **9 misi**, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Aslusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi’iah dengan tekad menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan berkelanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip Mou Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
5. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;

6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, dirancang 15 (lima belas) program unggulan Pemerintah Aceh, yaitu ;

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus)

Merupakan Jaminan Kesejahteraan Aceh yang meliputi akses layanan kesehatan gratis yang lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi;

2. Aceh Siat (Sistem Informasi Aceh Terpadu)

SIAT merupakan pengembangan sistem informasi dan database Aceh yang terpadu yang akan digunakan untuk semua sektor pembangunan dan pelayanan masyarakat;

3. Aceh Carong

Anak Aceh cerdas (carong) yang mampu bersaing dan mengukir prestasi di tingkat nasional dan regional dapat dicapai melalui pendidikan yang berkualitas;

4. Aceh Energi

Pemenuhan energi listrik bagi rakyat Aceh dan industri yang berasal dari energi bersih-terbarukan;

5. Aceh Meugoe dan Melaot

Pembangunan pertanian dan ekonomi maritim melalui program intensifikasi dan eksistensifikasi;

6. Aceh Troe

Pemenuhan bahan pangan dan gizi bagi seluruh rakyat Aceh secara mandiri;

7. Aceh Kreatif

Mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya ;

8. Aceh Kaya

Merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang ditunjang dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar;

9. Aceh Peumulia

Pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) akan dijalankan dengan ;

10. Aceh Dame

Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif ;

11. Aceh Meuadab

Mengembalikan khittah Aceh sebagai Serambi Mekkah melalui implementasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari ;

12. Aceh Teuga

Mengembalikan dan meningkatkan prestasi olahraga Aceh di tingkat nasional dan regional ;

13. Aceh Green

Menegaskan kembali pembangunan aceh berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang sensitif terhadap resiko bencana alam ;

14. Aceh Seuniya

Penyediaan perumahan bagi masyarakat miskin dan pasangan muda;

15. Aceh Seumeugot

Memastikan tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan untuk mendukung pencapaian tujuan semua program unggulan terutama yang menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi .

3.2.1 Tugas dan Fungsi BPPA yang Terkait Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah

Dalam RPJMA , Badan Penghubung Pemerintah Aceh sesuai tugas dan fungsi mempunyai peran untuk ikut mewujudkan 3 Misi Kepala Daerah yaitu :

1. Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Aslusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iah dengan tekad menghormati mazhab yang lain;
3. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam pencapaian Misi pertama yaitu *Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan*, program unggulan yang terkait adalah *Aceh Pemulia*, berkenaan hal tersebut sasaran target kinerja yang akan dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Misi kedua *Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya ke acehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Aslusunnah Waljamaah yang bersumber hukum mazhab Syafi'iah dengan tekad menghormati mazhab yang lain*, program unggulan yang terkait adalah *Aceh Meudab*, berkenaan hal tersebut sasaran target kinerja yang akan dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah menguatkan tata budaya adat Istiadat dan seni ke-Acehan yang islami.

Sedangkan Misi ketiga *Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan*, misi ini berkaitan dengan program unggulan *SIAT*, berkenaan hal tersebut sasaran target kinerja yang akan dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah ikut berperan mendukung Pemerintah Aceh dalam membangun Bank Data yang terintegrasi.

3.2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA yang mempengaruhi pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah.

Faktor penghambat yang dihadapi Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam mewujudkan visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah adalah :

1. Keterbatasan Sumber Daya ASN dalam pelayanan publik, perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan Sumber Daya ASN.
2. Standar Operasi Pelayanan yang masih kurang berjalan.
3. Sarana dan Prasarana untuk kegiatan seni budaya perlu ditingkatkan.

Sedangkan faktor pendorong terlaksananya visi, misi dan program unggulan Kepala Daerah yang dimiliki Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah:

1. Dalam hal menguatkan tata budaya adat Istiadat dan seni ke-Acehan yang islami, Badan Penghubung Pemerintah Aceh memiliki beberapa SDM yang memiliki keterampilan dalam melaksanakan kegiatan seni budaya Aceh melalui tari-tarian dan nyanyian Aceh, serta telah dilakukan pengkaderan.
2. Badan Penghubung juga mengelola Anjungan Aceh yang bisa dijadikan wadah pengenalan dan pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran seni budaya Aceh di Jabodetabek.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRABADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

3.3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA yang Mempengaruhi Pencapaian Sasaran, Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Renstra *Kementerian Dalam Negeri* yang terkait dengan tugas pokok dalam kaitan tugas Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah, menetapkan beberapa sasaran strategis yaitu :

1. Memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di daerah;
2. Mengoptimalkan data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi pembangunan Daerah (SIPD) sebagai dasar pembangunan.

Dalam sasaran strategis yang ditetapkan *Kementerian Dalam Negeri*, telah sejalan dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Penghubung Pemerintah Aceh selaku Badan yang bertugas menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan daerah provinsi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA yang Mempengaruhi dari implikasi RTRW dan KLHS

Badan Penghubung Pemerintah Aceh merupakan Perangkat Daerah Non Teknis. karena tidak melakukan pembangunan fisik dilapangan, sehingga kebijakan yang diambil tidak berimplikasi dengan RTRW/KLHS dan pelanggaran terhadap RTRW/ KLHS tidak terjadi.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

3.5.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPA ditinjau dari Tugas dan Fungsi, Sasaran Jangka Menengah, Renstra K/L dan Kab/Kota, implikasi RTRW dan KLHS

Badan Penghubung Pemerintah Aceh selaku Badan yang bertugas menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintah dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat

dan daerah provinsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 merupakan Perangkat Daerah Non Teknis. Karena tidak melakukan pembangunan fisik dilapangan, sehingga tidak berimplikasi dengan RTRW/KLHS.

Selain itu Badan Penghubung Pemerintah Aceh merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penghubung dalam pelayanan Pemerintah Provinsi Aceh dengan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan tugas tersebut, sehingga tidak memiliki dampak terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kab/Kota

3.5.2 Metode Penentuan Isu-Isu Strategis

Adapun metode penentuan isu-isu strategis dengan melihat kembali faktor-faktor permasalahan dari pelayanan di BPPA ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan BPPA;
2. Sasaran dalam RPJMA

Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPPA tahun rencana. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan BPPA dilakukan dengan cara menggunakan metode pembobotan sebagai berikut:

- Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Merupakan Tugas dan Tanggung jawab SKPA	25
2	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	25
3	Memilik daya ungkit untuk pembangunan daerah	15
4	Kemungkinan atau kemudahannya ditangani	10
5	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	TOTAL	100

- Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tabel diatas, dengan mengisi tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3
 Nilai Skala Kriteria

No	Nilai Skala Kriteria ke					Total Skor	
	Isu Strategis	1	2	3	4		5
1	Tata kelola pemerintahan dan pelayanan public masih kurang baik	25	20	15	10	25	95
2	Pelayanan dan pembinaan terhadap Masyarakat Aceh di Jabodetabek belum maksimal	25	20	5	10	15	75
3	Pelayanan fasilitasi kegiatan promosi dan pameran seni budaya Aceh di Jabodetabek belum maksimal	25	20	5	10	25	85
4	Ketersediaan Informasi mengenai Aceh secara keseluruhan masih belum optimal	25	20	15	10	25	95

3.5.3 Isu-Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra BPPA Tahun 2017-2022

Melihat dari uraian pada tabel 3.2 dan 3.3 serta pemeringkatan terhadap isu-isu strategis tersebut, BPPA yang mempunyai tugas utama membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Aceh untuk mendukung kelancaran hubungan dan kerjasama antar lembaga, membina masyarakat Aceh perantauan di wilayah pulau Jawa dan sekitarnya, menyelenggarakan promosi daerah, mengelola Anjungan Aceh di Taman Mini Indonesia Indah dan aset Pemerintah Aceh yang ada di pulau Jawa, menetapkan Isu-isu strategis yang akan ditangani yaitu :

- a. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih kurang baik;
- b. Ketersediaan Informasi mengenai Aceh secara keseluruhan masih belum optimal;
- c. Pelayanan fasilitasi kegiatan promosi dan pameran seni budaya Aceh di Jabodetabek belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

4.1.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPA

Tujuan dan Sasaran Strategis yang hendak dicapai Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam kurun waktu 5(lima) tahun adalah :

1. TUJUAN

- a. Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas;
- b. Terwujudnya penguatan tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami;
- c. Terwujudnya informasi dan data yang terintegritas.

2. SASARAN

- a. Meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan publik;
- b. Menguatkan tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang islami;
- c. Membangun informasi dan data yang terintegrasi melalui website.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penghubung Pemerintah Aceh beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut

4.1.2 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPPA

Tabel 4.1 (T-C.25)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas Birokrasi pelayanan publik	Tingkat/Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Pemerintah Aceh	35 %	40 %	50 %	65 %	85 %
2	Terwujudnya Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami	Menguatkan Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta	8 keg	9 keg	10 keg	11 keg	12 keg
			Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek	15000 org	15500 org	16000 org	16500 org	17000 org
3	Terwujudnya Informasi dan Data yang Terintegrasi	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang terintegrasi melalui website	Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1300 org	1700 org	1900 org	2500 org	2800 org
			Tingkat/Persentase kepuasan pengakses data dan informasi pada website Badan Penghubung Pemerintah Aceh Badan Penghubung Pemerintah Aceh	30 %	34 %	38 %	50 %	56 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan BPPA dalam 5 Tahun

Strategi merupakan serangkaian upaya yang didasarkan pada potensi sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, satu strategi dapat dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran dengan kerangka logis. Sementara itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan strategi agar lebih sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkelanjutan dalam waktu 5(lima) tahun periode Renstra. Adapun Strategi dan Arah Kebijakan yang hendak dicapai BPPA dalam kurun waktu 5(lima) tahun dapat dilihat pada tabel 5.1.

5.2 Relevansi dan Konsistensi Antara Visi dan Misi RPJMA Periode 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPPA

Melalui visi dan misi dalam RPJMA 2017-2022 dilahirkan beberapa tujuan dan sasaran, melalui tujuan dan sasaran tersebut dilahirkan juga beberapa indikator kinerja. Merujuk pada visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMA, BPPA merumuskan beberapa Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai target kinerja dalam RPJMA tersebut, sesuai dengan tupoksi dan potensi sumberdaya yang dimiliki BPPA.

5.3 Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintah Yang Adil dan Melayani			
MISI 1	Reformasi Birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan			
NO	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	3	2	4	5
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas Birokrasi pelayanan publik	<p>1. Peningkatan tata kelola dan manajemen SDM Aparatur Pemerintah Daerah</p> <p>2. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan urusan kemasyarakatan</p> <p>3. Meningkatkan Pembinaan kepada Masyarakat Aceh perantauan.</p>	<p>Meningkatkan kualitas ASN dalam pelayanan urusan kepada masyarakat melalui bimtek</p> <p>Pemberian bantuan pengurusan pemulangan masyarakat Aceh yang terlantar kembali ke daerah Aceh</p> <p>Pemberian bantuan penginapan terhadap masyarakat Aceh yang sedang menjalani pengobatan.</p> <p>Pemberian bantuan akomodasi dan transportasi bagi tamu Pemerintah Aceh</p> <p>Memfasilitasi pengurusan pemulangan jenazah masyarakat Aceh di Jakarta</p> <p>Penyusunan Database masyarakat Aceh se-Jabodetabek sebagai bahan penyusunan kegiatan pembinaan Masyarakat Aceh.</p> <p>Mengadakan workshop kepada masyarakat Aceh perantauan dalam hal pembinaan</p> <p>Menyelenggarakan kegiatan silaturahmi dan sosialisasi program dari Pemerintah Aceh kepada Masyarakat Aceh Perantauan.</p> <p>Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik</p>

MISI 2	Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam Beserta Nilai-Nilai Keislaman Dan Budaya Keacehan Dalam Kehidupan Masyarakat Dengan Iktikad Ahlussunnah Waljamaah Yang Bersumber Hukum Mahzab Sya'iyah Dengan Tetap Menghormati Mahzab Yang Lain			
1	Terwujudnya Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami	Menguatkan Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami	Penyelenggaraan kegiatan seni dan budaya Aceh.	Penyelenggaraan kegiatan pagelaran dan pameran seni budaya Aceh.
				Penyelenggaraan kegiatan koordinasi pelestarian, Pengembangan kebudayaan dan seni tradisional Aceh.
				Penyediaan Informasi tentang potensi aceh melalui buku-buku, buklet dan website
				Meningkatkan kualitas ASN melalui bimtek dalam melakukan pelayanan promosi dan pameran
				Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelayanan promosi dan pameran di Anjungan Aceh TMII
MISI 3	Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan			
1	Terwujudnya Informasi dan Data yang Terintegrasi	Membangun Informasi dan Data yang Terintegrasi melalui website	Membangun program pengembangan data dan informasi	Menjalani kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pengumpulan data
				Meningkatkan kualitas ASN melalui bimtek dalam melakukan pengumpulan dan pengolahan data
				Meningkatkan sarana dan prasarana dalam pengolahan data

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BPPA

Untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam 5(lima) tahun kedepan tahun 2017-2022, terdapat beberapa program yang masing-masing memiliki kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman
- l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- m. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- n. Pelayanan protokoler pejabat daerah di Jakarta dan sekitarnya

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

- a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- b. Pembangunan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur

- d. Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi
- e. Pengadaan Komputer
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan pelatihan Formal
- b. Pembinaan mental dan fisik Aparatur

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sedangkan Program dan Kegiatan yang *spesifik* pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat diluar Daerah :

- a. Pelayanan Masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya
- b. Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se-Jabodetabek di Jakarta
- c. Pertemuan Unsur Pemda Aceh dengan Forbes

2. Program Pagelaran Seni Budaya Aceh

- a. Pagelaran Seni Budaya Aceh
- b. Koordinasi Pelestarian, Pengembangan Kebudayaan dan Seni Tradisional
- c. Promosi Potensi Aceh (*Usulan*)

3. Program Pengembangan Data dan Informasi

- a. Penyusunan Database Masyarakat Aceh berdasarkan profesi se-Jabodetabek
- b. Pengembangan Informasi melalui Website

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel 6.1.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator BPPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rensta Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2012-2017 bertujuan untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA. Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

7.2 Tabel Indikator Kinerja BPPA yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

Tabel 7.1 (T-C.28)

Indikator Kinerja Badan Penghubung Pemerintah Aceh yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMA	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tingkat/Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	35 %	35 %	40 %	50 %	65 %	85 %	85 %
2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta	73 keg	8 keg	9 keg	10 keg	11 keg	12 keg	50 keg
3	Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya Aceh islami yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek/ Anjungan Aceh	20000 org	15000 org	15500 org	16000 org	16500 org	17000 org	80000 org
4	Jumlah Pengakses Data dan Informasi pada Website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1300 org	1500 org	1700 org	1900 org	2500 org	2800 org	10400 org
5	Tingkat/Persentase Kepuasan Pengakses Data dan Informasi pada Website Badan Penghubung Pemerintah Aceh*	30 %	30 %	34 %	38 %	50 %	56 %	56 %

BAB VIII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Badan Penghubung Pemerintah Aceh tahun 2017-2022 yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Aceh di bidang pelayanan dan promosi potensi daerah diharapkan bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja Pemerintah Aceh. Rencana Strategis ini wajib menjadi acuan bagi setiap sub bidang yang ada pada Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2017-2022.

Rencana Strategis ini juga dapat menjadi panduan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai alat evaluasi setiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh.

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH

Rupiah x 1 juta

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA	Penanggung Jawab	
							2018		2019		2020		2021		2022				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
				Belanja Langsung				14.843.260.441		32.724.032.273		7.300.080.820		7.995.668.901		8.760.815.792		71.623.858.227	
1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas birokrasi pelayanan			Tingkat/ Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan BPPA	35 %	35 %	14.356.815.441	40 %	32.724.032.273	50 %	6.627.097.900	65 %	7.277.887.689	85 %	7.993.756.459	85 %	68.979.589.762	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	100 %	100 %	7.586.908.916	100 %	12.499.999.313	100 %	3.774.501.675	100 %	4.147.451.842	100 %	4.357.697.026	100 %	32.366.558.772	PHB JKT
				Kegiatan															
			3.00.07.3.00.07.01.01.001	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa pelayanan pembuatan dan pengiriman surat menyurat serta pengiriman barang	80 paket/ pengirim an	80 paket/ pengirim an	60.200.000	88 paket/ pengirim an	207.780.000	80 paket/ pengirim an	54.300.000	80 paket/ pengirim an	59.730.000	80 paket/ pengirim an	65.703.000	408 paket/ pengirim an	447.713.000	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sambungan telepon, air dan listrik untuk Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmhs Dinas & Anjungan Aceh	12 bln	12 bln	2.149.703.370	12 bln	1.684.980.000	12 bln	484.000.000	12 bln	504.900.000	12 bln	547.890.000	60 bln	5.371.473.370	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.006	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lengkapinya administrasi kendaraan dinas/ operasional	26 STNK	26 STNK	100.000.000	26 STNK	119.000.000	26 STNK	100.000.000	26 STNK	100.000.000	26 STNK	110.000.000	130 STNK	529.000.000	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.008	4 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan Gedung kantor, Mess Aceh, Rmhs Dinas dan Anjungan Aceh	4 gedung	4 gedung	285.899.996	4 gedung	509.914.000	4 gedung	46.281.000	4 gedung	50.909.100	4 gedung	56.000.010	20 gedung	949.004.106	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.010	5 Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan sarana administrasi gedung perkantoran	72 jenis	72 jenis	23.782.500	72 jenis	82.207.000	72 jenis	50.495.500	72 jenis	55.545.050	72 jenis	61.099.555	360 jenis	273.129.605	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.011	6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	30 jenis	30 jenis	35.828.550	30 jenis	387.429.313	30 jenis	39.608.550	30 jenis	43.569.405	30 jenis	47.926.346	150 jenis	554.362.164	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.012	7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya bahan kelistrikan dan penerangan kantor	4 gedung	4 gedung	32.352.500	4 gedung	96.110.000	4 gedung	11.825.000	4 gedung	13.007.500	4 gedung	14.308.250	20 gedung	167.603.250	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.013	8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan perlengkapan Kantor untuk lancarnya operasional Kantor	25 Barang	0 Barang	-	25 Barang	454.100.000	25 Barang	70.000.000	25 Barang	120.000.000	25 Barang	125.000.000	100 Barang	769.100.000	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.014	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya pengadaan peralatan rumah tangga	3 Jenis	3 Jenis	66.060.000	3 Jenis	698.950.000	3 Jenis	31.130.000	3 Jenis	34.243.000	3 Jenis	37.667.300	15 Jenis	868.050.300	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.015	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan sebagai pengetahuan	5 jenis	5 jenis	-	5 jenis	48.000.000	5 jenis	21.000.000	5 jenis	23.100.000	5 jenis	25.410.000	25 jenis	117.510.000	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.017	11 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk tamu Pimpinan dan Pegawai yang bekerja diluar jam dinas	11 Bulan	11 Bulan	847.075.000	11 Bulan	1.438.770.000	11 Bulan	345.250.000	11 Bulan	379.775.000	11 Bulan	417.752.500	55 Bulan	3.428.622.500	PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.01.01.018	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi dalam dan luar daerah	59 kali	60 kali	607.704.000	140 kali	1.378.020.000	140 kali	569.550.000	140 kali	622.505.000	140 kali	484.755.500	620 kali	3.662.534.500	PHB JKT

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA	Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=5+7+9+11+13	16	17				
			3.00.07.3.00.07.01.01.022	13 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya dana penunjang pelayanan adm. Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	2.528.858.000	12 Bulan	3.309.464.000	12 Bulan	1.490.284.000	12 Bulan	1.639.312.400	12 Bulan	1.803.243.640	60 Bulan	10.771.162.040	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.01.023	14 Pelayanan protokol pejabat daerah di Jakarta dan sekitarnya	a jumlah kegiatan pelayanan terhadap pejabat yang bertugas di Jakarta dan sekitarnya b Jumlah tamu Pemerintah Aceh yang difasilitasi akomodasi/pembiayaan c Jumlah tamu Pemerintah Aceh yang difasilitasi transportasi	1800 kali	1800 kali	849.445.000	1800 kali	2.085.275.000	1800 kali	460.777.625	1800 kali	500.855.387	1800 kali	560.940.926	9000 kali	4.457.293.938	PHB JKT	
						286 org	49 org		50 org		50 org		50 org		50 org		249 org		PHB JKT	
						86 org	20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		100 orang		PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	100 %	100 %	6.747.406.525	100 %	16.906.870.960	100 %	1.866.050.075	100 %	2.062.655.082	100 %	2.478.920.591	100 %	30.061.903.233	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.03	Kegiatan 1 Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan gedung Kantor	1 Gedung	0 Gedung	-	0 Gedung	-	1 lahan	1.000.000.000	1 perencana	500.000.000	1 Gedung	1.000.000.000	1 Gedung	2.478.920.591	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.05	2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya kendaraan ops. Untuk pelayanan keg. Pejabat	26 unit	0 unit	-	11 unit	7.200.000.000	0 unit	-	0 unit	-	3 unit	300.000.000	14 unit	7.500.000.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.010	3 Pengadaan Meubelair	Tersedianya meubelair Gedung Kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas dan Anjungan Aceh	4 Gedung	0 Gedung	-	4 Gedung	644.380.000	4 Gedung	50.000.000	4 Gedung	50.000.000	4 Gedung	55.000.000	16 Gedung	799.380.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.012	4 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi Kantor	4 Gedung	0 Gedung	-	4 Gedung	675.700.000	1 Gedung	50.000.000	1 Gedung	20.000.000	1 Gedung	22.000.000	7 Gedung	767.700.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.013	5 Pengadaan komputer	Tersedianya perangkat/ alat perkantoran	5 unit	0 unit	-	5 unit	364.200.000	5 unit	25.000.000	5 unit	25.000.000	5 unit	27.500.000	20 unit	441.700.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.021	6 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya bangunan rumah dinas	1 Gedung	1 Gedung	138.000.000	1 Gedung	181.600.000	1 Gedung	68.600.000	1 Gedung	70.460.000	1 Gedung	77.506.000	5 Gedung	536.166.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.022	7 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor, Mess Aceh dan Anjungan Aceh	3 Gedung	3 Gedung	4.800.990.000	3 Gedung	5.009.700.000	3 Gedung	75.000.000	3 Gedung	50.000.000	3 Gedung	55.000.000	15 Gedung	9.990.690.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.024	8 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas, penggantian suku cadang dan biaya BBM	160 Service	160 Service	1.643.486.525	160 Service	2.411.930.960	160 Service	518.098.075	160 Service	1.259.907.882	160 Service	845.898.671	800 Service	6.679.322.113	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.028	9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor, Mess Aceh, Rmh Dinas dan Anjungan Aceh	4 Gedung	4 Gedung	142.610.000	4 Gedung	371.540.000	4 Gedung	41.532.000	4 Gedung	45.685.200	4 Gedung	50.253.720	20 Gedung	651.620.920	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.02.030	10 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan Kantor komputer, printer dll	12 bulan	12 bulan	22.320.000	12 bulan	47.820.000	12 bulan	37.820.000	12 bulan	41.602.000	12 bulan	45.762.200	60 bulan	195.324.200	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai	100 %	100 %	-	100 %	86.500.000	100 %	144.200.000	100 %	144.200.000	100 %	144.200.000	100 %	519.100.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.03.002	Kegiatan 1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian Pegawai BPPA	76 Pegawai	0	-	76 Pegawai	86.500.000	90 Pegawai	144.200.000	90 Pegawai	144.200.000	90 Pegawai	144.200.000	346 Pegawai	519.100.000	PHB JKT	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA	Penanggung Jawab		
							2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=5+7+9+11+13	16	17				
			3.00.07.3.00.07.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	20 %	100 %	22.500.000	100 %	246.210.000	100 %	215.476.800	100 %	237.024.480	100 %	260.726.928	100 %	981.938.208	PHB JKT	
				Kegiatan																
			3.00.07.3.00.07.01.05.001	1 Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	10 org	10 org	22.500.000	10 org	70.000.000	50 org	154.276.800	50 org	169.704.480	50 org	186.674.928	170 org	603.156.208	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.05.004	2 Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah Kegiatan Pengajaran rutin dan pembinaan mental Pegawai BPPA	44 Pertemuan	0 Pertemuan	-	22 Pertemuan	176.210.000	22 Pertemuan	61.200.000	22 Pertemuan	67.320.000	22 Pertemuan	74.052.000	88 Pertemuan	378.782.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (lakip, renja, laporan keuangan, laporan realisasi dll)	0 %	0 %	-	0 %	-	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	90.000.000	PHB JKT	
				Kegiatan																
				1 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah laporan SAKIP yaitu Renja, Lakip, LKJP dan Keuangan yang terselesaikan	4 laporan	0 laporan	-	0 laporan	-	4 laporan	30.000.000	4 laporan	30.000.000	4 laporan	30.000.000	12 laporan	90.000.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.015	Program peningkatan pelayanan masyarakat di luar daerah	Tingkat/ Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BPPA	35 %	35 %	-	40 %	1.515.650.000	50 %	596.869.350	65 %	656.556.285	85 %	722.211.914	85 %	3.491.287.549	PHB JKT	
				Kegiatan																
			3.00.07.3.00.07.01.015.001	1 Pelayanan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya	Jumlah masyarakat yang dilayani BPPA	290 org	60 org	-	125 org	1.154.450.000	125 org	126.219.350	125 org	185.906.285	125 org	251.561.914	560 org	1.718.137.549	PHB JKT	
					a Jumlah masyarakat Aceh telantar yang difasilitasi untuk kembali ke daerah asal	290 org	60 org		50 org		50 org		50 org		50 org		260 org			
					b Jumlah pembinaan masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya	0 org	0 org		40 org		40 org		40 org		40 org		160 org			
					c Jumlah masyarakat Aceh yang diberikan fasilitas akomodasi rumah singgah	0 org	0 org		25 org		25 org		25 org		25 org		100 org			
					d Jumlah masyarakat Aceh yang difasilitasi pemulangan jenazah	0 org	0 org		10 org		10 org		10 org		10 org		40 org			
			3.00.07.3.00.07.01.015.002	2 Pertemuan Pemda Aceh dengan Masyarakat Aceh se jabodetabek di Jakarta	Jumlah Terselenggaranya kegiatan siturahnya dan penyampaian program Pemerintah Aceh kepada masyarakat Aceh di Jabodetabek	1 keg	0 keg	-	1 keg	266.050.000	3 keg	284.750.000	3 keg	284.750.000	3 keg	284.750.000	10 keg	1.120.300.000	PHB JKT	
			3.00.07.3.00.07.01.015.003	3 Pertemuan Unsur pemda Aceh dengan Forbes	Jumlah Terselenggaranya kegiatan pertemuan antara Pejabat/ Pemerintah Aceh bersama Forbes DPR/DPD RI asal Aceh	1 keg	0 keg	-	1 keg	95.150.000	1 keg	185.900.000	1 keg	185.900.000	1 keg	185.900.000	4 keg	652.850.000	PHB JKT	

NO	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja Awal RPJM Aceh Tahun 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMA	Penanggung Jawab			
							2018		2019		2020		2021		2022				Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=5+7+9+11+13	16	17					
2	Terwujudnya Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami	Menguatkan Tata Budaya Adat Istiadat dan Seni ke-Acehan yang Islami			Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta	73 keg	8 keg	452.025.000	9 keg	1.401.152.000	10 keg	600.276.800	11 keg	640.304.480	12 keg	684.334.928	50 keg	3.778.093.208	PHB JKT		
					Jumlah pengunjung pada pelaksanaan kegiatan promosi dan pameran Seni budaya Aceh Islami yang dilaksanakan Badan Penghubung Pemerintah Aceh di Jabodetabek/Anjungan Aceh TMII	15000 org	15000 org		15500 org		16000 org		16500 org		17000 org		80000 org				PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.0 1.016	Program Pagelaran Seni Budaya Daerah	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Aceh di Jakarta	73 keg	8 keg	452.025.000	9 keg	1.401.152.000	10 keg	600.276.800	11 keg	640.304.480	12 keg	684.334.928	50 keg	3.778.093.208	PHB JKT		
				Kegiatan																	
			3.00.07.3.00.07.0 1.016.001	1 Pagelaran Seni Budaya Aceh	Jumlah terselenggaranya kegiatan pagelaran seni budaya Aceh di Jabodetabek	69 keg	8 keg	452.025.000	9 keg	1.401.152.000	7 keg	400.276.800	8 keg	440.304.480	9 keg	484.334.928	41 keg	3.178.093.208	PHB JKT		
			3.00.07.3.00.07.0 1.016.004	2 Koordinasi Pelestarian, Pengembangan Kebudayaan dan Seni Tradisional	Jumlah terselenggaranya kegiatan koordinasi dan pengembangan kesenian khas Aceh di Jabodetabek	4 keg	0 keg	-	0 keg	-	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000	1 keg	100.000.000	3 keg	300.000.000	PHB JKT		
				3 Promosi Potensi Aceh	Jumlah terselenggaranya kegiatan Promosi Potensi Aceh	0 keg	0 keg	-	0 keg	-	2 keg	100.000.000	2 keg	100.000.000	2 keg	100.000.000	6 keg	300.000.000	PHB JKT		
3	Terwujudnya Informasi dan Data yang terintegritas	Membangun Informasi dan data yang terintegritas melalui website			Jumlah pengakses data dan informasi pada website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.300 org	1.500 org	34.420.000	1.700 org	67.650.000	1.900 org	72.706.120	2.500 org	77.476.732	2.800 org	85.224.405	10400 org	337.477.257	PHB JKT		
					Tingkat/ Persentase kepuasan pengakses data dan informasi pada website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	30 %	30 %		34 %		38 %		50 %		56 %		56 %				PHB JKT
			3.00.07.3.00.07.0 1.017	Program Pengembangan data dan Informasi	Jumlah pengakses data dan informasi pada website Badan Penghubung Pemerintah Aceh	1.300 org	1.500 org	34.420.000	1.700 org	67.650.000	1.900 org	72.706.120	2.500 org	77.476.732	2.800 org	82.724.405	10400 org	334.977.257			
				Kegiatan																	
			3.00.07.3.00.07.0 1.017.001	1 Pengembangan informasi melalui website	Jumlah teruploadnya informasi melalui pengelolaan website	112 Informasi	112 Informasi	34.420.000	112 Informasi	67.650.000	115 Informasi	47.706.120	118 Informasi	52.476.732	120 Informasi	57.724.405	577 Informasi	259.977.257	PHB JKT		
			3.00.07.3.00.07.0 1.017.002	2 Penyusunan database masyarakat aceh se-Jabodetabek	Jumlah pendataan informasi Masyarakat Aceh	250 informasi	0 informasi	-	0 informasi	-	40 informasi	25.000.000	40 informasi	25.000.000	40 informasi	25.000.000	120 informasi	75.000.000	PHB JKT		

Jakarta, 15 Maret 2019

Kepala Badan Penghubung

Pemerintah Aceh



Almuniya Kamal, SSTP. M.Si

Pembina

NIP. 19800120 199912 1 001